

Pola Komunikasi Politik: DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus

Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus,¹ Nur Syamsudin,² Masrohatun,³

¹Women Empower Women At Work, ²FISIP UIN Walisongo, Semarang – Indonesia, ³FISIP UIN Walisongo, Semarang – Indonesia

Abstract

The existence of political parties that carry out their roles and functions will bring significant changes in the democratic process, if carried out optimally. One of the functions of political parties is communication. Political parties and their functions are expected to increase the effectiveness of the political communication process. This study aims to determine the application of the function of political parties as a means of political communication in the DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus because their existence and movement and the obstacles that faced. This research was written using a qualitative research type with a descriptive approach. Data was collected by means of observation and interviews. The political communication of the DPC PKB Kudus aims to channel the aspirations and community aggregations which are then processed into public policies. The pattern of political communication is carried out through formal institutional channels of political parties, the PKB faction in the DPRD and informally through personal and meetings. The obstacles faced in the process of political communication related to community, communication between factions, and communication with the executive.

Keberadaan partai politik yang mengemban peran dan fungsinya akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi, apabila dilakukan dengan maksimal. Salah satunya fungsi komunikasi politik. Partai politik bersama fungsi yang dimilikinya diharapkan mampu menambah efektifitas proses komunikasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bagi masyarakat Kabupaten Kudus karena eksistensinya dan pergerakannya serta hambatan yang dihadapi . Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Komunikasi politik DPC PKB Kudus bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang kemudian diproses menjadi kebijakan publik. Adapun pola komunikasi politik yang dilakukan melalui jalur formal kelembagaan partai politik, Fraksi PKB di DPRD dan informal melalui personal dan pertemuan. Hambatan yang dihadapi dalam proses komunikasi politik berkaitan komunikasi dengan masyarakat, komunikasi antarfraksi di DPRD dan komunikasi dengan pihak eksekutif.

Keywords: Political communication, Politics, DPC PKB, Political function, Political party

¹ Penulis adalah Aktivistis Komunitas Women Empower Women At Work

² Penulis adalah Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

³ Penulis adalah Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendahuluan

Sebagai sektor perantara rakyat dengan pemerintah, partai politik memiliki peran dalam bernegara sebagai komunikator politik atau penghubung antara pemerintah dan yang diperintah atau masyarakat. Dalam kompleksnya perkembangan masyarakat modern, berkembang pula berbagai macam pendapat dan aspirasi oleh masyarakat. Dengan hal ini, maka dibutuhkan adanya penggabungan kepentingan dan aspirasi sehingga dapat diolah dengan bentuk yang lebih teratur. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berkewajiban untuk dapat mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan-kepentingan tersebut oleh masyarakat. Hal ini yang kemudian dirumuskan menjadi usul kebijakan yang disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah sehingga tercipta kebijakan umum (Budiarjo, 2008).

Partai politik dilahirkan bersamaan dengan segala fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Partai politik menjadi pilar demokrasi yang baik apabila mampu menerapkan peran dan fungsinya dengan optimal. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh partai politik berangkat dari realitas empirik yang kemudian melalui proses evolusi yang panjang. Melalui fungsinya, kehadiran partai politik dalam masyarakat memiliki tanggungjawab dalam pemberian kekuatan politik bagi masyarakat (N Kusuma, 2020). Indonesia dengan sistem kepartaian multi partai berhasil melahirkan berbagai macam partai dengan ideologinya masing-masing. Lahirnya berbagai macam partai ini merupakan salah satu hasil atas tuntutan reformasi yang terjadi pada tahun 1999 yang selanjutnya dituliskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Sistem kepartaian yang dianut oleh Indonesia ini juga ditujukan sehingga tidak ada satu pihak pun yang mendominasi pemerintahan sehingga terjadi pengendalian oleh satu partai. Studi partai politik menjadi penting untuk dikaji sebab salah satu perannya sebagai

intermediary sector antara pemerintah dan masyarakat madani.

Pola komunikasi menurut Soejanto (2005) diartikan sebagai gambaran sederhana dari proses komunikasi antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya yang sifatnya berkaitan (Soejanto, 2005). Komunikasi politik merupakan hal yang fundamental dalam sistem politik karena dianggap sebagai salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Dengan tugasnya tersebut, politisi berkewajiban menjangkau segala aspirasi atas permasalahan yang terjadi, yang kemudian diwujudkan dengan pemberitahuan atas kebijakan yang telah dibuat yang kemudian dapat ditanggapi oleh warga. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Althoff, 2008) bahwa pelaksanaan komunikasi politik merupakan pengaruh dari unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yakni: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan pendengar (Kurniasih, 2014).

Komunikasi organisasi dimaknai sebagai penerimaan berbagai pesan dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005). Komunikasi organisasi terbagi menjadi dua jenis yakni komunikasi formal dan komunikasi informal. Sebagai unit komunikasi dalam sebuah organisasi, Dua jenis komunikasi ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana pendistribusian informasi antar anggota organisasi. Efektif atau tidaknya komunikasi formal dan informal berpengaruh pada penyaluran informasi dan efektivitas organisasi, baik dalam konteks hubungan maupun pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi formal memiliki sifat dan orientasi untuk kepentingan organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara bersama dan sifatnya sosial. Komunikasi formal bisa dilakukan lewat lisan maupun tulisan. Lewat lisan berarti komunikasi formal dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih. Sedangkan dalam komunikasi informal, hal ini terbentuk karena

adanya kedekatan fisik maupun social dan lebih banyak dilakukan secara langsung, tanpa perantara dengan kesan jujur, saling percaya, dan terbuka (Hardjana, 2016).

Fungsi utama yang sulit dilaksanakan adalah fungsi jembatan antara masyarakat dan pemerintah karena partai dianggap tak lagi dapat mewaliki suara rakyat banyak. Hal ini terjadi karena kecenderungan partai politik untuk mengutamakan kepentingan para elit maupun kekuasaan bagi anggota partai politiknya daripada kepentingan implementasi fungsi yang sesungguhnya bagi bangsa dan negara. Pelaksanaan fungsi komunikasi ini seringkali menghasilkan informasi yang berat sebelah sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga menghambat perkembangan kehidupan politik. Dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik diharapkan mampu menambah efektifitas proses komunikasi politik antara pemerintah dengan rakyat (Sunarto, 2020).

Salah satu partai besar yang berangkat dari gejolak politik pada era reformasi adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan mengangkat ideologi moderat, PKB memiliki prioritas juang akan kedaulatan, keadilan, dan persatuan bagi rakyat. Pengikut Nadhlatul Ulama beranggapan bahwa partai politik ini didirikan sebagai wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi. Pada tahun 1999. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengikuti pemilu yang pertama kalinya. Pada pesta demokrasi perdana yang diikuti partai ini mampu meraup 13.336.982 suara (12,61%) setara 51 kursi di DPR RI. Sedangkan pada pemilu terakhir 2019 PKB mampu peroleh suara 13.570.097 (9,69%) serta menempati posisi empat. Pemilu 2019 ini merupakan sebuah prestasi terbaik partai ini setelah pemilu pertama yang diikutinya pada tahun 1999 (Hamad, 2004).

Eksistensi dan pergerakan yang dilakukan PKB dalam kegiatan kemasyarakatan dinilai sangat baik oleh masyarakat, khususnya di

Kabupaten Kudus. DPC PKB Kabupaten Kudus mampu mendapatkan perolehan suara tertinggi berturut-turut sejak pemilihan umum tahun 1999 hingga 2009 dan berhasil memperoleh 7 kursi atau sekitar 15% dari jumlah total 45 anggota dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kudus tahun 2019-2024 serta mampu memperoleh 9,04% menurut Persentase Perolehan Partai oleh KPU Kabupaten Kudus tahun 2019 (Sumber: KPU Kabupaten Kudus)

Perolehan suara yang didapatkan oleh PKB Kabupaten Kudus tentunya tak bisa dipisahkan dengan tugas yang menyertainya. Mengingat urgensi atas pelaksanaan fungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan perolehan suara yang didaparkannya dalam hal agregasi dan artikulasi kepentingan, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, pola penggabungan aspirasi dan kepentingan masyarakat oleh partai politik; kedua, substansi dan proses perumusan aspirasi dan kepentingan; ketiga, hambatan aktualisasi komunikasi politik DPC PKB Kudus.

Studi mengenai penerapan fungsi komunikasi politik partai telah banyak dilakukan oleh para ahli. Ada beberapa pustaka yang dapat penulis jadikan sebagai instrumen perbandingan serta acuan dalam melakukan penelitian. Fungsi partai politik merupakan hal vital bagi partai politik dalam penyelenggaraan demokrasi. Namun sayangnya, dewasa ini penyelenggaraan fungsi partai politik dirasa masih lemah. Banyaknya hambatan menyebabkan terciptanya banyak penyelewengan fungsi komunikasi di ranah publik. (Maarotong, 2015) berhasil mengungkap fakta bahwa komunikasi politik hanya dilakukan ketika menjelang kampanye dan tidak ada program yang telah disusun untuk menampung aspirasi masyarakat dan hanya terbatas pada tingkat internal pengurus partai, kader dan simpatisannya. Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat oleh (Almutahar, 2016) salah satunya karena keterbatasan waktu anggota Fraksi dalam

menyerap aspirasi masyarakat atau reses, keterbatasan waktu terkait jadwal kegiatan anggota DPRD, serta dana kunjungan lapangan yang dibatasi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia dalam partai politik juga disampaikan oleh (Kurniasih, 2014) yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi.

Meski demikian, kegagalan berbagai partai politik dalam menjalankan fungsinya tak semata-mata karena minimnya usaha yang dilakukan oleh partai politik. Banyak juga partai politik yang sudah melakukan fungsinya dengan baik dan menuai hasil yang positif. Pada jurnal yang ditulis Nurdin (2018), menurutnya efektivitas pola komunikasi tercipta melalui bentuk dialog maupun kunjungan langsung ke lapangan oleh tokoh masyarakat. Menurut (Hutomo, 2015), pola komunikasi politik yang dilakukan face to face juga sampai sekarang terbukti masih efektif. Pendekatan kepada masyarakat dan tokoh untuk dapat berdialog dan mengumpulkan aspirasi membangkitkan minat masyarakat untuk menerima keputusan dari pesan. Efektivitas pola komunikasi lainnya juga disampaikan oleh (Farhan, 2019) dengan melakukan segmentasi pasar dan menggaet para pemuda dengan inisiasi program kerja.

Penelitian ini merupakan gabungan dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari survei dan wawancara serta jurnal terdahulu. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap kader DPC PKB untuk mendapatkan data yang optimal secara mendalam karena penulis terlibat langsung secara intensif dengan melakukan tanya jawab yang terbuka dengan informan sehingga penulis dapat mengerti bagaimana maksud ide pemikiran informan. Penelitian juga dilakukan melalui observasi terhadap kader serta staff DPC PKB Kudus dan media sosial. Observasi ini dilakukan untuk menghasilkan data pendukung yang diperoleh dari wawancara. Analisis data dilakukan melalui reduksi data untuk mempertajam hasil penelitian, menyajikan data

secara naratif, dan kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan, mengisi kesenjangan, dan memperkuat hasil karya dari sarjana-sarjana sebelumnya yang mencoba mengkaji tentang peranan partai politik beserta fungsi komunikasi politik yang dimiliki partai politik khususnya dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat melalui pola yang dilakukan DPC PKB Kudus beserta hambatan yang dilaluinya.

Proses Penggabungan Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat

DPC PKB Kudus dinilai aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat beserta proses penyaluran aspirasi masyarakat melalui fraksi di DPRD. PKB dinilai dekat dengan masyarakat karena banyak terjun langsung dan melakukan kegiatan sosial apalagi di masa pandemi ini. Dengan dekatnya PKB dengan masyarakat ini menjadikan masyarakat lebih leluasa dalam perihal penyampaian aspirasi atau usulan. PKB Kabupaten Kudus memiliki berbagai macam pola dan pendekatan dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat. PKB juga senantiasa bekerja sama dengan pengurus Nahdlatul Ulama beserta badan otonominya dalam mengadakan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. PKB Kudus melakukan penyerapan aspirasi melalui optimalisasi struktur perangkat partai untuk melakukan kerja-kerja taktis maupun strategis. Implementasi komunikasi politik dilakukan melalui jalur kelembagaan partai politik, fraksi PKB di DPRD dan personal politisi PKB. Dalam hal agregasi kepentingan masyarakat membagi tugasnya kedalam dua pola yakni pola formal dan informal melalui tiga saluran komunikasi politik yakni media massa, media interpersonal, dan media organisasi. Sebagai sebuah disiplin ilmu, komunikasi memiliki pola atau potensi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pola komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi politik yang diteruskan dari sebuah sistem politik ke sistem-sistem yang lainnya. Berdasarkan pada hasil wawancara,

kegiatan penyaluran informasi kepada khalayak serta proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh partai politik dibagi menjadi dua pola, yakni pola formal melalui partai politik dan fraksi dan serta pola informal. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, penyerapan aspirasi oleh partai politik beserta fraksi tak hanya dilakukan dengan pola formal dan terstruktur namun juga dengan pola informal misalnya dalam pertemuan yang sifatnya umum.

Komunikasi Pola Formal

Komunikasi formal dalam hal ini dilakukan dengan mengikuti rantai komando oleh organisasi yang dilakukan secara fungsional sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya masing-masing. Pertama, pola yang dijalankan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus lebih terfokuskan kepada penyerapan aspirasi melalui fraksi PKB DPRD Kabupaten Kudus yakni dengan program reses. Karena kader partai yang ada di DPRD selaku perpanjangan tangan dari partai dinilai lebih berwenang dalam proses komunikasi politik bagi proses penggabungan aspirasi dan kepentingan masyarakat oleh partai politik. Dalam hal ini, anggota DPRD memiliki hak dan diberi anggaran untuk melakukan reses. Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi fraksi dan juga partai politik untuk dapat mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan masyarakat sehingga mampu menghasilkan output kebijakan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dari Fraksi PKB ini terlaksana dengan sangat maksimal. Reses oleh anggota fraksi dilakukan sebanyak tiga kali setiap tahunnya.

Adanya reses oleh Fraksi PKB menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Skema penyerapan aspirasi oleh anggota fraksi PKB seperti dikemukakan MK (45):

"Pola kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Fraksi PKB Kudus ada dua macam, yaitu

yang pertama mengundang atau menghadirkan konstituen dalam satu forum kegiatan ataupun mendatangi konstituen secara langsung"

Reses dijalankan dengan mengumpulkan perwakilan 100 orang dari tiap-tiap dapil yang kemudian diminta untuk menyalurkan aspirasinya serta kegelisahannya melalui blanko yang diberikan oleh anggota dewan. Dari blanko yang diberikan pada acara reses tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang yakni anggota dewan di DPRD.

Kedua, melalui sosialisasi. Selain itu penyerapan aspirasi juga terjadi pada acara-acara yang digelar oleh DPC PKB Kudus. Acara yang diselenggarakan oleh partai politik ini bukan secara gamblang acara yang dibuat sebagai penyerapan aspirasi politik. Proses penyerapan aspirasi politik ini dilakukan pada acara sosialisasi ataupun acara-acara partai lainnya seperti Santunan Anak Yatim dan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh JPPNU Kudus dan diprakarsai oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus. Acara yang diselenggarakan DPC PKB Kudus dengan menggandeng Jaringan Perempuan dan Pemuda Nadhlatul Ulama (JPPNU) Kudus ini merupakan sebuah acara santunan anak yatim yang dihadiri oleh perwakilan dari badan otonomi dan badan partainya tersebut. Pada acara ini juga diselipkan komunikasi politik dan juga sosialisasi politik tentang materi kepartaian. Acara ini diselenggarakan rutin setiap Jum'at di seluruh desa di daerah Kudus. Namun, sesekali acara ini juga dilakukan di kota Demak dan juga Jepara. Hubungan antara DPC PKB Kudus dengan Nahdlatul Ulama' Kabupaten Kudus memang sangat dekat. Dalam hal perumusan kebijakan salah satunya, DPC PKB Kudus selalu mendengarkan saran dari Nahdlatul Ulama', baik saran mengenai kebijakan yang akan dibuat maupun saran dalam bidang lainnya. Termasuk kerjasamanya dalam pemberdayaan program-program yang dibuat untuk masyarakat, partai politik, fraksi, beserta organisasi Nadhlatul Ulama

di Kudus ini saling bergandeng tangan dan menyongsong satu sama lain untuk perihal memasalahkan umat demi kesejahteraan bersama.

Pada konteks ini, DPC PKB Kudus melakukan proses proses penyerapan aspirasi dengan melalui kegiatan wajib seperti reses anggota dewan dan sosialisasi. Pola komunikasi informal yang dijalankan DPC PKB Kudus dijalankan melalui pola hierarki kewenangan organisasi atau struktur organisasi yang sifat dan orientasinya lebih ditekankan pada organisasi (A. R. Dilapanga dan Jeane Mantiri, 2021).

Komunikasi Pola Informal

Meskipun dalam organisasi besar diberlakukan proses komunikasi dengan pola formal, hal ini nampaknya masih kurang menguntungkan bagi sudut pandang masyarakat maupun organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, timbul lah pola komunikasi berbeda yang dilakukan oleh DPC PKB yakni dengan pola informal, sebagai sebuah bagian dari aktivitas resmi yang dilakukan partai politik. Hasil penelitian di lapangan terkait penyerapan aspirasi masyarakat tentunya memiliki banyak pola, upaya, dan pendekatan yang dilakukan oleh anggota DPRD beserta partai politik untuk memaksimalisasikan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Untuk menyerap aspirasi ini tentunya dibutuhkan sebuah pola komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat sehingga mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Selain dengan melakukan komunikasi kelompok yang bersifat formal, lebih terorganisir, serta lebih terlembaga, biasanya komunikasi antara anggota DPRD maupun partai politik kepada masyarakat juga dapat dilakukan secara informal ataupun tidak terlembaga. Pola informal dalam hal ini bersifat lebih personal atau lebih ke kegiatan sehari-hari pejabat dan kegiatannya pun tidak diatur di dalam peraturan daerah.

Pertama, pertemuan informal. DPC PKB Kudus banyak menyelenggarakan pertemuan informal yang mana dari sana lah masyarakat mampu menjadi lebih dekat dengan anggota

fraksi dan partai politik sehingga aspirasinya bisa lebih terdengar. Contoh kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kudus pada tahun 2021 diantaranya adalah acara vaksinasi Covid-19 DPC PKB Kudus, penyaluran bantuan Covid-19, bantuan sembako pada pasien isolasi mandiri, ojek dan PKL, pemberian bantuan pada petugas pemulasaran jenazah, PKL Sekolah dan pemberian bantuan pada shelter pondok pesantren. Dalam pertemuan umum ini, seringkali dihadiri juga oleh H. Mukhasiron selaku Ketua DPC PKB Kudus yang mana juga merupakan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, sehingga dengan adanya program yang digalakan oleh partai politik, masyarakat bisa merasa lebih dekat dengan partai politik sehingga masyarakat bisa dengan lebih mudah dalam penyampaian aspirasi atau keluhan yang dimilikinya.

Kedua, pola komunikasi melalui personal anggota partai politik. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat juga sangat diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota fraksi secara personal baik melalui perantara ataupun secara tatap muka. Melalui partai politik, masyarakat juga dapat dengan mudah menyampaikan keluhan ataupun aspirasinya kepada staff atau pengurus partai apabila diperlukan bantuan untuk keperluan bersama. Namun, dalam penyampaian keluhan kepada partai politik, dalam partai politik terdapat keterbatasan anggaran, sehingga tidak setiap keluhan mampu terealisasikan. Perlu diambil skala prioritas sehingga partai bisa memilih aspirasi masyarakat yang mana yang mau diproses. Hal ini disampaikan oleh RK (26)

“Tinggal disampaikan saja keluhannya ke partai, bisa dengan proposal sehingga kami juga memprosesnya jadi lebih mudah, namun biasanya kami ada keterbatasan anggaran jadi tidak seluruhnya kami bisa cover.”

Komunikasi informal cenderung mengalir dan dilakukan secara tidak resmi. Informasi mampu lebih mudah didapatkan melalui atas ke bawah, bawah ke atas, ataupun horizontal. Dalam komunikasi informal ini, penyampaian informasi

oleh masyarakat ke pihak partai politik ataupun sebaliknya sifatnya lebih mengalir dan lebih santai (A. R. Dilapanga dan Jeane Mantiri, 2021).

Proses Perumusan Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat

Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik memiliki fungsi untuk menjadi penyalur antar banyak dan ragamnya pendapat serta aspirasi masyarakat yang harus diproses dan digabungkan untuk ditampung menjadi usuka kebijakan. Proses tersebut dinamakan interest aggregation atau penggabungan kepentingan. Pendapat dan aspirasi yang diterima kemudian diolah dan dirumuskan ke dalam bentuk yang teratur (interest articulation) dan diajukan sebagai usul dari kebijakan partai politik melalui kader partai politik di fraksi atau perpanjangan tangan dari partai politik.

Selanjutnya, partai politik akan memperjuangkan agar pendapat dan aspirasi tersebut dapat dijadikan kebijakan umum (public policy) oleh pemerintah. Partai politik berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan fungsi yang dimiliki partai politik, tuntutan dan usulan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

DPC PKB Kudus melalui instrumen yang dimilikinya yakni fraksi PKB di DPRD Kabupaten Kudus menjadi perpanjangan tangan bagi partai politik dalam hal penggabungan kepentingan oleh masyarakat melalui fraksi PKB, partai politik dapat memperjuangkan pendapat dan aspirasi masyarakat hingga menjadi kebijakan umum. Anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui tiga fungsi yang dimilikinya, anggota DPRD sebagai perpanjangan tangan dari partai politik dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah perihal tuntutan dan usulan yang disampaikan.

Anggota DPRD melalui kewajibannya untuk menyerap aspirasi di daerah pilihnya diberikan

kesempatan dan tunjangan untuk reses sebanyak tiga kali dalam setiap tahunnya. Dalam kegiatan reses, anggota DPRD diberikan kesempatan untuk interaksi langsung dengan masyarakat, konstituen, tokoh masyarakat, dan stakeholder di wilayah masing-masing. Polarisasi reses bisa dilakukan dengan mengumpulkan konstituen di dalam satu acara maupun datang secara pribadi kepada konstituen. Pertemuan antara anggota DPRD dengan konstituen menjadi sebuah momentum bagi kedua belah pihak untuk bisa saling memberikan informasi. Dari hasil komunikasi antara anggota fraksi dengan masyarakat, kemudian dibentuklah Pokir atau pokok-pokok pikiran hasil serapan aspirasi masyarakat yang kemudian dimasukkan kepada eksekutif sebagai saran kegiatan. Pokok pikiran yang didapatkan saat reses anggota DPRD ini menjadi salah satu dasar penyusunan APBD.

Anggota DPRD dengan fungsinya untuk budgeting atau penganggaran dapat diwujudkan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah atau badan eksekutif. Masing-masing anggota DPRD memiliki hak untuk mengusulkan pokok pikiran yang diambil dari kegiatan reses untuk dianggarkan menjadi APBD. APBD berasal dari aspirasi masyarakat yang diambil pada saat reses yang kemudian dijadikan usulan atau pokok-pokok pikiran yang kemudian dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah menjadi RKPD, hal yang dibahas selanjutnya adalah terkait penganggaran. Permasalahan anggaran dibahas bersama eksekutif melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mana merupakan rancangan prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada RKPD tersebut untuk menjadi acuan sebelum disepakati dengan DPRD.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan kebijakan umum terkait anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

Rancangan KUA-PPAS yang dibahas oleh badan eksekutif dan legislatif ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD yang nantinya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus. KUA-PPAS memiliki target dan capaian kinerja dari program yang dilaksanakan pemerintah daerah. KUA-PPAS dirancang dengan memperhatikan kondisi perekonomian tingkat daerah, regional, nasional, maupun global.

Atas dasar fungsi legislasi yang dimiliki, DPRD secara lembaga memiliki hak inisiasi untuk memunculkan rancangan peraturan daerah (raperda). Inisiasi raperda bisa muncul dari personal anggota DPRD, masing-masing fraksi, yang kemudian terlembaga melalui badan perencanaan pembangunan daerah (Bapemperda). Raperda yang diajukan oleh fraksi bisa diambil usulannya melalui serapan aspirasi masyarakat yang membutuhkan payung hukum. Raperda ini kemudian dikaji secara akademik dan dituliskan di dalam naskah akademik. Sebelum penyusunan peraturan daerah ini, biasanya dibentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan kunjungan atau studi banding ke daerah lain yang sudah lebih dahulu mengkaji tentang perda yang akan dibahas.

Sistematika yang pengajuan raperda oleh fraksi dilakukan dengan mengajukan surat yang disampaikan kepada Ketua DPRD yang kemudian prosesnya dikawal oleh anggota fraksi yang bertugas di bapemperda sehingga kemudian dimunculkan inisiasi raperda yang diajukan oleh fraksi. Sebelum raperda yang diusulkan disahkan, dibuat acara Public Hearing yang mana mendatangkan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, pihak yang bersangkutan dengan raperda tersebut untuk dimintai pandangannya terkait raperda yang akan diusulkan. Setelah itu baru raperda disahkan oleh Bupati setelah jangka waktu 30 hari dari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD. Dalam pelaksanaannya, usulan yang dibuat oleh badan legislatif ini diserahkan kepada badan eksekutif untuk dapat

dieksekusi. Disinilah peran DPRD dalam fungsi pengawasan hadir.

Di tahun 2021, Fraksi PKB mengajukan lima raperda melalui Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus, diantaranya adalah Raperda Pondok Pesantren, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, Raperda Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Raperda Pemberdayaan Waqaf Produk, dan Raperda Produk Halal. Perumusan Raperda yang dilakukan oleh Fraksi PKB telah melalui proses *interest aggregation* atau penggabungan kepentingan. Pendapat yang kemudian diolah dan dirumuskan ke dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*) dan diperjuangkan agar dapat dijadikan kebijakan umum (*public policy*) oleh pemerintah (Budiarjo, 2008).

Hambatan Aktualisasi Komunikasi Politik

Sebagaimana hasil wawancara dengan kader dan pengurus partai cabang di Kabupaten Kudus ini tidak terlepas dari faktor yang menghambat pelaksanaan fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hambatan yang diperoleh partai politik dalam pelaksanaan fungsinya ini terbagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut;

Pertama, salah satunya hambatan komunikasi dengan masyarakat terkadang menjadi masalah adalah apabila konstituen banyak tidak hadir dalam acara *reses* tersebut. Dari sisi anggota fraksi, hambatan yang terjadi dalam komunikasi politik penyerapan aspirasi masyarakat adalah terkait realisasi dari aspirasi yang ditampung oleh Fraksi PKB. Basis sosial dan sumber daya manusia yang mumpuni menjadi kebutuhan utama dalam politik modern. Sehingga dalam hal ini, penentuan arah kebijakan politik maupun anggaran politik bisa sesuai dengan tata kelola dan tata laksana yang benar dan serapannya bisa tepat guna. Dengan kata lain, bahwa tidak semua aspirasi yang terserap ke dalam fraksi bisa terealisasikan. MK (45) Anggota DPRD Komisi D mengatakan:

“Anggaran itu sebenarnya hambatan dalam proses penyerapan aspirasi ini, anggarannya itu 1,5 Milyar tapi ternyata usulannya lebih dari 1,5 Milyar itu. Sebenarnya kendalanya ya disitu, selalu usulan lebih banyak dari anggaran. Jadi, kita cari yang skala prioritas saja, yang namanya orang usulan kan ya memang banyak”

Semua terbatas kepada anggaran dan kepentingan politik. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat adalah permasalahan anggaran, ketidakhadiran konstituen dalam reses, dan enggan masyarakat untuk usul.

Kedua, hambatan antar fraksi. Partai politik merupakan organisasi yang terbentuk berdasarkan tujuan yang sama. Partai politik terdiri dari berbagai orang dengan ideologi dan kepentingan yang sama. Partai politik dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politiknya masing-masing. Setiap partai politik memiliki visi misi yang berbeda. Partai politik tergabung atas sebuah kepentingan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan visi misi dan tujuan partai ini lah yang menjadi hambatan dalam proses realisasi kebijakan di dalam legislatif. Terbatasnya kuota ini juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Usulan yang ada selalu lebih banyak dari anggaran yang tercatat. Bisa disimpulkan bahwa permasalahan keterbatasan kuota dan anggaran ini lah yang menyebabkan terjadinya hambatan antar fraksi di legislatif.

Ketiga, hambatan dengan eksekutif. Menurut apa yang disampaikan H. Mukhasiron, selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, hambatan yang terjadi dengan eksekutif ini biasanya ada ketika proses perancangan RKP. Di dalam proses ini diambil permasalahan mana yang

urgensinya lebih tinggi untuk diselesaikan. Dalam proses perumusan inilah yang biasanya menuai perbedaan pendapat serta perdebatan dari pihak eksekutif dan legislatif. Perbedaan pendapat ini juga terjadi setelah proses perumusan RKP yang dilanjutkan dengan perumusan Rancangan KUA-PPAS.

KUA-PPS merupakan rancangan anggaran tahun anggaran berikutnya yang dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. KUA-PPAS memiliki target dan capaian kinerja dari program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dalam penyusunannya, KUA-PPAS memperhatikan perekonomian baik ditingkat daerah, regional, nasional, maupun global. Dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh badan eksekutif bersama badan legislatif ini seringkali menuai banyak perbedaan pendapat.

Pihak Fraksi PKB menyampaikan bahwa hambatan yang terjadi dengan eksekutif ini tidak begitu berarti. Hanya perbedaan pendapat yang terjadi dan hal tersebut dianggap bukan masalah besar. Pihak Fraksi PKB juga menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi di dalam proses musyawarah dan perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif bukanlah digolongkan sebagai sesuatu yang merugikan.

Kesimpulan

Komunikasi politik DPC PKB Kudus bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi masyarakat dan mengkomunikasikan kebijakan publik kepada khalayak atau masyarakat. DPC PKB Kudus melakukan penyerapan aspirasi melalui optimalisasi struktur perangkat partai untuk melakukan kerja-kerja taktis maupun strategis. Implementasi komunikasi politik dilakukan melalui jalur kelembagaan partai politik, fraksi PKB di DPRD dan personal politisi PKB.

Hambatan yang dihadapi dalam proses komunikasi politik berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat, komunikasi antarfraksi di DPRD dan komunikasi dengan pihak eksekutif. Hambatan yang dilalui partai politik dalam hal agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat ini masih berpusat di sekitar permasalahan anggaran. Banyaknya

usulan dari masyarakat terbatas pada anggaran yang ditetapkan. Tidak semua usulan yang disampaikan dapat terealisasi. Begitupula dengan usulan di antara fraksi legislatif. Dibutuhkan skala prioritas untuk merealisasikan rancangan peraturan yang diusulkan oleh berbagai fraksi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Dilapanga dan Jeane Mantiri, P. dan F. (2021). *Perilaku Organisasi*.
- Almutahar, L. (2016). Pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat tahun 2013 di Kecamatan Pontianak Timur. *Aspirasi Jurnal S1 Ilmu Politik*, 4(1).
- Althoff, M. R. P. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Farhan, M. (2019). No Title Strategi Komunikasi Politik Partai Kebangkitan bangsa (Pkb) Kabupaten Jember Menjelang pemilu kade Jawa Timur 2018. *Al Adalah*, 22(1).
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah study critical disourse analysis*. Granit.
- Hardjana, A. (2016). *Komunikasi Organisasi: Strategi dan Kompetensi*. Buku Kompas.
- Hutomo, R. S. (2015). *Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memobilisasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014*. Universitas Diponegoro.
- Kurniasih, D. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat* (p. 260).
- Maarotong, J. (2015). *Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik* (p. 11).
- N Kusuma, I. G. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX, 2020: 166. urdin. "Peranan Komunikasi Politik Golkar dalam Pengembangan Dakwah di Kecamatan Tapango Kabupaten Polman Sulawesi Barat. *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*.
- Soejanto, A. (2005). *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta.
- Sunarto. (2020). *Pengaruh Kompetensi, Komitmen, Dukungan Organisasi Partai Terhadap Motivasi Dan Kinerja Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus*.
- Wiryanto. (2005). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.